Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak Sekota Kupang: Kajian Sekolah Menengah Atas

Beatrix Purnama Sari[1]✉, Oded Liunokas[2]
(1) Teknik Informatika, Universitas San Pedro
(2) Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas San Pedro

✉ Corresponding author
(beatrixpurnama15@gmail.com)

Abstrak

Program merdeka belajar merupakan langkah tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal sesuai kondisi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan merdeka belajar di sekolah penggerak di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Dokumentasi, angket, observasi, dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa semua sekolah penggerak telah menerapkan kurikulum merdeka belajar. Sekolah telah melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, melaksanakan Asesmen Sekolah, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebijakan kurikulum merdeka, serta menggunakan Sistem yang baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kendala yang dihadapi guru dan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar antara lain sistem di dapodik yang belum disesuaikan dengan kurikulum, jumlah jam mengajar guru, jumlah siswa dalam rombongan belajar, raport siswa, kompetensi guru, serta sarana dan prasarana sekolah. Berbagai upaya dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Sekolah dan guru terus berupaya menjalankan kurikulum merdeka belajar secara maksimal sesuai kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: *Kurikulum, Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak.*

Abstract

Merdeka belajar curriculum program is the right step to achieve ideal education according to current conditions. This study aims to analyze the implementation of the merdeka belajar in sekolah penggerak in Kupang City, East Nusa Tenggara. A qualitative approach is applied in this research. Documentation, questionnaires, observations, and interviews were used to collect data The results of the study show that all schools have implemented an merdeka belajar curriculum. The school has carried out a Minimum Competency Assessment and Character Survey, carried out an School Assesment, prepared a Lesson Plan and implemented learning according to the merdeka belajar curriculum policy, and used the New Student Acceptance System. Obstacles faced by teachers and schools in implementing the merdeka belajar curriculum include the system in dapodik which has not been adapted to the curriculum, the number of teacher teaching hours, the number of students in study groups, student report cards, teacher competence and school facilities and infrastructure. Efforts were made by various schools to overcome the difficulties encountered. Schools and teachers continue to strive to run the merdeka belajar curriculum properly and follow government policies.

Keyword: *Curriculum, Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak.*

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan yang menjadi landasan program belajar mengajar (Syaifuddin, 2020). Kurikulum dengan tatanan yang memadai memicu peserta didik mampu mengonstruksi pengetahuan dan memanfaatkannya untuk kehidupan (Suryaman, 2020). (Hendri, 2020) menyatakan tujuan kurikulum akan tercapai jika penerapannya sesuai dengan kondisi sekolah dan peserta didik yang beragam. Selama ini proses belajar hanya bertumpu kepada guru. Peserta didik dikatakan belajar apabila mampu mengingat dan menghafal informasi atau pelajaran. Pembelajaran seperti ini tidak akan membuat peserta didik menjadi aktif, mandiri dan bebas dalam mengembangkan pengetahuannya. Pendidikan yang humanis harus sampai pada titik kulminasi di mana mampu membawa manusia untuk merdeka secara lahir batin (Sesfao, 2020). Kebijakan kurikulum harus memberikan kebebasan berinovasi

dan belajar secara mandiri pada sekolah, guru, dan peserta didik (Widiyono & Millati, 2021). Bangsa yang maju mampu memberikan kontribusi pemikiran melalui kebijakan- kebijakan pendidikan agar dapat memberikan perbaikan dan peningkatan (Asfiati & Mahdi, 2020).

Berkaitan dengan fenomena tersebut pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah meluncurkan sebuah kebijakan bertajuk Merdeka Belajar pada bulan Desember tahun 2019 lalu (Mardiana, 2020). Hasil penelitian *Programme for International Student Assesment* (PISA) tahun 2019 menjadi pemicu kebijakan tersebut. Peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi ke-74 dari 79 negara atau keenam dari bawah untuk bidang matematika dan literasi (Hasim, 2020; Sasikirana & Herlambang, 2020). Kebijakan ini diharapkan mengembalikan sistem pendidikan pada esensi Undang-Undang di mana memberikan kebebasan penuh kepada sekolah, guru dan peserta didik untuk berinovasi, bebas, mandiri dan kreatif (Ainia, 2020; Sherly et al., 2020). Di samping itu juga ada program sekolah pengerak yaitu berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik dan diawali dengan SDM yang unggul (Patilima, 2021). Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak (Muji et al., 2021). Sekolah penggerak menjadi salah satu langkah dalam mencapai kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma baru (Faiz et al., 2022).

Kurniawan (2020) mengungkapkan pendidikan yang memerdekakan menempatkan keaktifan peserta didik menjadi unsur utama dalam menentukan proses dan kesuksesan belajarnya. Kebebasan berinovasi harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional (Sherly et al., 2020). Penambahan inovasi pembelajaran yang tepat akan membangkitkan kemandirian dan percaya diri peserta didik (Ramadania & Aswadi, 2020). Peran guru sangat bervariasi dalam menciptakan iklim meliputi fasilitator pembelajaran, guru inovatif dan kreatif, guru berkarakteristik, dan guru penggerak (Daga, 2021). Merdeka belajar menjadi solusi konkrit mengatasi permasalahan pendidikan yang komplit dan memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara yaitu pendidikan mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa (Muhajir et al., 2021; Sesfao, 2020). (Ainia, 2020) menyatakan merdeka belajar memberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri karena selama ini pendidikan lebih menekankan pada aspek pengetahuan.

Sistem pendidikan merdeka belajar mengambil pemikiran *John Dewey* yang berlandaskan manusia harus mengikuti perkembangan zaman dan menekankan keleluasaan lembaga pendidikan dalam mengekplorasi kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta didik (Widodo et al., 2020). Hal ini sejalan dengan konsep *live long education*, sehingga Indonesia tidak tertinggal dari sistem pendidikan di negara lain. Aspek lainnya adalah pentingnya pengembangan skill dan karakter untuk menyeimbangkan keduanya (Faiz & Kurniawaty, 2020). Pengajaran akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Belajar dengan *outing class*, tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, kreatif dan inovatif (Hasim, 2020).

Kebijakan Merdeka belajar mencakup empat program di antaranya Ujian Nasional (UN) yang disubstitusikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diganti dengan ujian (asesmen) sekolah, penyederhanaan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan kebijakan baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Muhajir et al., 2021). Secara filosofis, keempat program tersebut berhulu pada prinsip *independent human being* (Mardiana, 2020). Pada era Revolusi Industri 4.0 kebutuhan utama yang ingin dicapai sistem pendidikan, yaitu penguasaan terhadap literasi baru di antaranya literasi data, teknologi dan manusia serta pada pembangunan karakter peserta didik (Yamin & Syahrir, 2020). Kebijakan merdeka belajar merupakan respons terhadap era baru dan dalam menghadapi *era society* 5.0 (Sasikirana & Herlambang, 2020).

Merdeka belajar merupakan langkah tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal sesuai kondisi saat ini dengan tujuan mempersiapkan generasi tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia (Ainia, 2020). Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa semua guru dan sekolah mendukung penuh program merdeka belajar (Pertiwi & Pusparini, 2021; Yamin & Syahrir, 2020). Berdasarkan hasil observasi sekolah di SMA sekota Kupang, terdapat beberapa sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar. Kurikulum ini tergolong baru sehingga butuh penyesuaian untuk mengatasi kendala dan kesulitan yang dihadapi. Seperti hasil peneitian sebelumnya tentang implementasi merdeka belajar mengungkapkan bahwa guru memiliki kesiapan yang tinggi dalam penyederhanaan RPP namun memiliki kesiapan yang rendah dalam pelaksanaan asesesmen kompetensi minimum dan survei karakter (Afista et al., 2020). Penelitian lain menemukan tidak semua usaha yang guru lakukan dalam mengimplementasikan merdeka belajar berhasil, namun guru tetap memberi peluang kepada peserta didik untuk bebas berinteraksi di dalam pembelajaran (Kurniawan, 2020). Berdasarkan uraian fenomena persoalan ini, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan fokus menganalisis penerapan program-program kurikulum merdeka belajar di sekolah penggerak Kota Kupang serta kendala dan upaya yang dihadapi sekolah dan guru. Hasil penelitian diharapkan memiliki implikasi dan kontribusi bagi pengembangan sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan mengkaji program pokok kebijakan merdeka belajar dan menetapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan data deskriptif dari hasil observasi, kuesioner, wawancara dan dokumen. Data deskriptif kualitatif ini diarsir pada fenomena apa saja yang dilakukan sekolah penggerak dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, bagaimana sekolah menyelenggarakan ujian (asesmen), bagaimana guru menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan bagaimana pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga semuanya sesuai dengan kebjakan dari kurikulum merdeka belajar. Pendekatan ini dianggap tepat menjawab permasalahan karena peneliti berpeluang menggali secara mendalam melalui observasi langsung, wawancara, serta kajian dokumentasi untuk mengetahui bagaimana strategi dan kesiapan serta sejauh mana sekolah-sekolah penggerak dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar. Secara keseluruhan alur pelaksanaan penelitian disajikan pada Gambar 1.

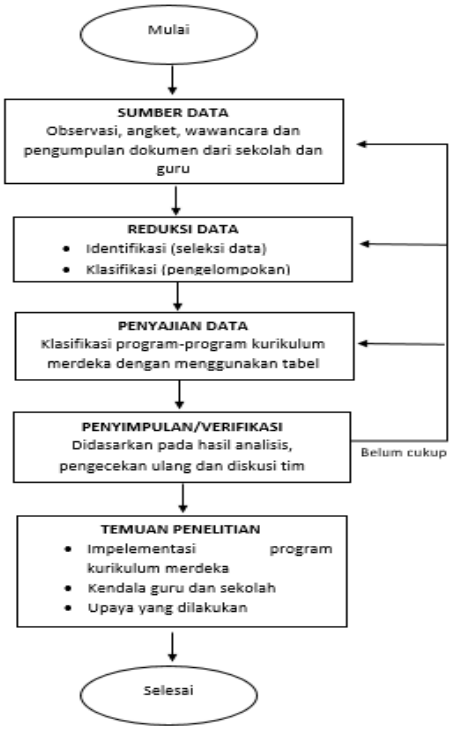

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Proses dimulai dengan melakukan wawancara kepada 5 orang subyek penelitian, yaitu kepala sekolah, kepala kurikulum dan guru-guru lain yang dipilih secara acak di masing- masing sekolah penggerak. Guru-guru telah dilatih dan menerapkan kurikulum merdeka belajar sejak semester ganjil tahun ajaran 2021/2022. Observasi dilakukan pada program-program merdeka belajar yang dijalankan sekolah khususnya pada kegiatan pembelajaran yang lebih memberikan ruang dan kebebasan bagi guru serta peserta didik. Berbeda dengan observasi, wawancara mendalam lebih difokuskan pada bagaimana strategi, kesiapan dan pelaksanaan sekolah dalam menjalankan setiap program dan kebijakan dari kurikulum merdeka belajar mulai dari pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter hingga penerimaan peserta didik baru. Proses wawancara dilakukan menggunakan rekaman dan catatan (poin penting) di berbagai waktu dan tempat sesuai dengan kesempatan dan kesepakatan subyek serta dilakukan secara terpisah untuk memberikan nuansa kenyamanan dalam memberikan informasi. Peneliti menggunakan wawancara mendalam sambil dikonfirmasi dengan data observasi dan analisis dokumen. Teknik dokumentasi dipakai untuk menyelidiki hasil atau bukti dokumen dari pelaksanaan program-program kurikulum tersebut. Proses analisis meliputi tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Pada tahap reduksi data dilakukan proses pemilihan dan pengelompokan data yang sesuai, penyederhanaan data, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama kegiatan penelitian. Penyajian data dilakukan untuk memastikan bahwa data tersebut valid dan akurat, disajikan dalam bentuk tabel. Penyimpulan dan verifikasi didasarkan pada hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis implementasi program kurikulum merdeka belajar di sekolah pengerak berdasarkan hasil observasi, dokumen, angket dan wawancara dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu implementasi program kurikulum merdeka belajar dan kendala serta yang dihadapi guru dan sekolah. Implementasi kurikulum merdeka belajar meliputi Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Pelaksanaan Ujian Sekolah (Asesmen), Penyusunan RPP dan Pelaksanaan Pembelajaran, serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Hasil penelitian penerapan kurikulum merdeka belajar berdasarkan observasi, angket disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar

Pernyataan	Ya	%	Tidak	%
Kurikulum merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan yang menjadi landasan program belajar mengajar	15	100	0	0
Merdeka belajar merupakan kebebasan mutlak dan hakiki berpikir dan berinovasi yang dimiliki oleh setiap warga belajar	15	100	0	0
Program merdeka belajar memberi kebebasan pada peserta didik dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri	15	100	0	0
Sekolah saat ini sudah menggunakan kurikulum baru (Kurikulum Merdeka Belajar)	15	100	0	0

Mengacu pada tabel 1, 100% sekolah pengerak telah menerapkan kurikulum merdeka belajar. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang meluncurkan Merdeka Belajar pada bulan Desember sejak tahun 2019 lalu (Mardiana, 2020). Dengan adanya program ini dapat memberi kebebasan pada peserta didik dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada di dalam diri. Hasil wawancara juga menunjukan bahwa sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka belajar. Sekolah mengungkapkan bahwa makna merdeka belajar adalah kebebasan mutlak dalam berpikir, berinovasi mandiri dan kreatif. Sekolah mengharapkan program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu membentuk pelajar yang berbudi luhur, kompeten, dan siap untuk terjun di masyarakat sesuai dengan bidangnya. Sejalan dengan Ainia (2020) merdeka belajar merupakan langkah tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal sesuai kondisi saat ini.

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter

Hasil penelitian pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter berdasarkan analisis dokumen dan angket disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Pelaksanan Asesmen Kompetensi Minimum Dan Survei Karakter

Pernyataan	Ya	%	Tidak	%
Sekolah masih mengikuti UN (Ujian Nasional) dari pusat	15	100	0	0
Sekolah melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum	15	100	0	0
Sekolah mengadakan Survei Karakter	15	100	0	0
Sekolah menekankan kemampuan penalaran menggunakan bahasa (literasi)	15	100	0	0
Sekolah menekankan kemampuan penalaran menggunakan matematika (numerasi)	15	100	0	0
Kemampuan Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep	15	100	0	0
Kemampuan Numerasi yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata	15	100	0	0
Guru sebagai aktor pembelajar utama harus memiliki kemandirian dalam melakukan penilaian terhadap hasil belajar	15	100	0	0
Penilaian hasil belajar berbasis pada aplikasi, analisis dan	15	100	0	0

formatif				
Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter diikuti oleh peserta didik yang berada di tengah jenjang sekolah yaitu kelas XI	9	60	6	40
Hasil Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki mutu pembelajaran selanjutnya	15	100	0	0

Mengacu pada tabel 2, 100% sekolah pengerak telah melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sebagai pengganti UN (Ujian Nasional). Hal ini sesuai dengan salah satu program yang dijalankan pada kurikulum merdeka (Muhajir et al., 2021). Sekolah menekankan kemampuan penalaran menggunakan bahasa (literasi) dan matematika (numerasi) serta penguatan pada pendidikan karakter (Mustaghfiroh, 2020). Penelitian terdahulu mengungkapkan literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan dan memahami konsep (Hasim, 2020). Guru mengungkapkan kemampuan Numerasi yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata.

Hasil wawancara dengan guru menunjukan bahwa Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sudah dilaksanakan dari tahun 2021 dan melibatkan kelas X dan kelas XI. Asesmen dilaksanakan di lab multimedia melalui tes online secara nasional yang meliputi tes literasi, numerasi dan survei karakter atau lingkungan belajar. Soal yang diberikan langsung dari pusat dengan tujuan untuk mengukur prestasi sekolah sama seperti Ujian Nasional (UN) sebelumnya. Perbedaannya seluruh peserta didik dilibatkan dalam UN sedangkan untuk tes ini peserta didik dipilih secara acak dari pusat sebanyak 50 dimana 5 peserta didik sebagai cadangan. Hasil tes berupa rapor pendidikan yang dikembalikan ke sekolah masing-masing sebagai bahan evalusi untuk sekolah (Evaluasi Diri Sekolah/EDS). Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, hasil tes beragam sesuai dengan standar dan level masing-masing. Ada peserta didik yang mahir, cukup dan ada yang kurang. Dengan adanya hasil tersebut sekolah terus berusaha meningkatkan kemampuan peserta didik dengan memperbanyak kegiatan literasi dan numerasi. Sejalan dengan penelitian terdahulu guru juga mengaharapkan hasilnya dapat menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki mutu pembelajaran sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya (Hendri, 2020; Mustaghfiroh, 2020).

Pelaksanaan Ujian (Asesmen) Sekolah

Hasil penelitian pelaksanaan Ujian (asesmen) sekolah berdasarkan analisis dokumen dan angket disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Pelaksanan Ujian (Asesmen) Sekolah

Pernyataan	Ya	%	Tidak	%
Sekolah masih melaksanakan USBN	0	0	15	100
Pelaksanaan USBN sudah diganti dengan ujian (asesmen) sekolah	15	100	0	0
Ujian (asesmen) diselenggarakan oleh sekolah sendiri	15	100	0	0
kebijakan Ujian (asesmen) memiliki tujuan memerdekakan institusi pendidikan dalam menilai hasil belajar peserta didik, tanpa harus mengacu sepenuhnya pada kriteria pemerintah pusat	15	100	0	0
Penilaian kompetensi peserta didik dapat dilakukan dengan penialain yang lebih komprehensif, seperti tes tertulis, portofolio, penugasan, tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya	15	100	0	0
Guru dan sekolah saat ini lebih merdeka dalam menilai hasil belajar peserta didik	15	100	0	0

Mengacu pada tabel 3, 100% sekolah pengerak sudah mengganti USBN dengan Ujian Sekolah (Asesmen) yang diselenggrakan oleh pihak sekolah sendiri. Hal ini serupa dengan kebijakan pemerintah yaitu pelaksanaan USBN yang diganti dengan asesmen dan sepenuhnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan masing-masing (Asfiati & Mahdi, 2020). Guru setuju bahwa kebijakan ini memiliki tujuan memerdekakan institusi pendidikan dalam menilai hasil belajar peserta didik, tanpa harus mengacu sepenuhnya pada kriteria pemerintah pusat dan penilaian kompetensi peserta didik dapat dilakukan dengan penialain yang lebih komprehensif, seperti tes tertulis, portofolio, penugasan, tugas kelompok,

karya tulis, dan sebagainya. Hasil wawancara juga menunjukan bahwa Pelaksanaan USBN sudah diganti dengan ujian sekolah dari tahun-tahun sebelumnya. Sekolah terakhir mengikuti USBN di tahun 2019. Sedangkan beberapa tahun terakhir sekolah sudah menyelenggarakan asemen sekolah. Untuk Penilaian kompetensi peserta didik tergantung kewenangan sekolah sendiri utuk memilih dan disepakati bersama pada saat rapat dewan guru. Dampaknya, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar peserta didik (Wijaya et al., 2020). Anggaran USBN dapat dialihkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dengan program-program pengembangan kapasitas guru dan sekolah (Hendri, 2020).

Penyusunan RPP dan Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil penelitian rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan analisis dokumen, observasi dan angket disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pernyataan	Ya	%	Tidak	%
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) masih menggunakan format lama	0	0	15	100
Kebijakan penyusunan RPP diberikan kepada guru sepenuhnya	15	100	0	0
Guru secara bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan RPP sesuai format	15	100	0	0
RPP disederhanakan secara efektif dan efisien menjadi satu halaman	8	53	7	47
RPP sebelumnya dianggap terlalu banyak memiliki komponen yang menuntut guru untuk memerinci isi pembelajarannya	15	100	0	0
RPP sebelumnya dianggap menguras waktu guru untuk mengembangkan diri dan terjebak pada administratif	11	73	4	27
Komponen inti RPP dalam kebijakan baru mencakup tujuan pembelajaran, tahapan kegiatan pembelajaran dan penilaian (asesmen)	15	100	0	0
Penilaian (asesmen) yang terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor	12	80	3	20
Waktu untuk persiapan dan evaluasi proses pembelajaran lebih banyak	15	100	0	0
Penyederhanaan administrasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi dan perkembangan peserta didik	15	100	0	0

Mengacu pada tabel 4, 100% guru di sekolah pengerak sudah menggunakan format baru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kebijakan penyusunan RPP diberikan kepada guru sepenuhnya. Guru secara bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan RPP sesuai format. Komponen inti RPP dalam kebijakan baru mencakup tujuan pembelajaran, tahapan kegiatan pembelajaran dan penilaian yang terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Hal ini juga sejalan dengan temuan terdahulu bahwa guru mempunyai kebebasan sendiri untuk mengembangkan RPP yang mencakup tujuan pembelajaran, tahapan kegiatan pembelajaran dan penilaian (asesmen) yang terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor (Asfiati & Mahdi, 2020; Sibagariang et al., 2021).

Hasil wawancara juga menunjukan guru sudah menggunakan format baru dalam penyusunan RPP. Format RPP disiapkan dari pusat dan sekolah punya kemerdekaan untuk menggunakannya atau memilih format yang disiapkan sekolah sendiri. Guru menyatakan RPP yang sekarang lebih muda karena kalau kurikulum sebelumnya memuat banyak kompetensi dasar (KD) dan kompetensi inti (KI). Format satu sekolah sama hanya isi nya tiap guru kembangakn masing-masing. RPP bisa lebih dari satu halaman tergantung guru yang mengembangkannya. Sejalan dengan penelitian Hendri (2020) penyederhanaan administrasi tersebut bertujuan agar waktu untuk persiapan dan evaluasi proses pembelajaran lebih banyak dan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi dan perkembangan peserta didik

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Hasil penelitian penerimaan peserta didik baru dengan kebijakan yang baru berdasarkan hasil angket disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pernyataan	Ya	%	Tidak	%
Kebijakan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem yang lama	8	53	7	47
Kebijakan PPDB dengan sistem zonasi diperluas	15	100	0	0
PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di setiap daerah	15	100	0	0
Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih luas yaitu 30% yang disesuaikan dengan kondisi daerah	15	100	0	0
Kebijakan PPDB untuk Jalur zonasi minimal 50 persen, Jalur afirmasi minimal 15 persen dan Jalur perpindahan maksimal 5 persen	15	100	0	0
Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi	15	100	0	0
Kebijakan PPDB dapat memeratakan akses dan kualitas pendidikan	15	100	0	0

Mengacu pada tabel 5, lebih dari sebagian sekolah pengerak telah menggunakan sistem yang baru dalam penerimaan peserta didik. 100% sekolah telah menerapkan Kebijakan PPDB dengan sistem zonasi yang diperluas. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih luas yaitu 30% yang disesuaikan dengan kondisi daerah (Hadi, 2020). Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempa. Kebijakan PPDB untuk Jalur zonasi minimal 50 persen, Jalur afirmasi minimal 15 persen dan Jalur perpindahan maksimal 5 persen. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi sehingga Kebijakan PPDB dapat memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Hasil wawancara juga menunjukan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini sudah dilaksanakan dari 5 tahun sebelumnya dan kebijakan baru yang dimaksud adalah perubahan pada pembagian persentase di jalur-jalur penerimaanya. Pada tahun 2018 sekolah menggunakan sistem zonasi di tahun pertama yaitu tahun uji coba. Untuk sekarang jalur afirmasi dan prestasi lebih diperluas apalagi di sekolah penggerak yang termasuk sekolah besar dan di tengah kota. Untuk sekolah yang lokasi jauh dan peminatnya kurang, sekolah lebih terbuka untuk semua jalur yang penting sesuai dengan kuota yang dibutuhkan. Jika sudah melebihi kuota baru di pasang sesuai kriteria sesuai kebijakan yang ada. Sejalan dengan penelitian Hendri (2020) guru juga mengungkapkan adanya kebijakan ini diharapkan agar pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan.

Selain pada program-program utama kebijakan merdeka, hasil temuan juga mengungkapkan perbedaan implementasi kurikulum merdeka belajar dengan kurikulum sebelumnya yaitu tentang penjurusan yang sudah diganti dengan pengelompokan, pengajaran yang menekankan pada profil pelajar pancasila dan ada penilaian diagnostik. Hal Ini menjadi solusi konkrit mengatasi permasalahan pendidikan yang komplit dan memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara yaitu pendidikan mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa (Sesfao, 2020). Pada kurikulum merdeka tujuan pengelompokan adalah agar peserta didik mempunyai kemerdekaan dalam menentukan pilihan. Pengajaran yang menekankan profil pelajar pancasila bertujuan agar peserta didik dapat menggali materi secara leluasa dan dengan waktu yang lebih banyak. Belajar tidak hanya di dalam kelas tapi bisa di luar kelas seperti lembaga-lembaga contohnya museum, pasar dan lainnya. Selain itu sebelum guru memberikan pembelajaran, guru melakukan analisis asesmen diagnostik untuk mengetahi kesiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran dan untuk mensurvei gaya belajar peserta didik (mendengar, melihat dan kinestetik). Ketika peserta didik tidak mengetahui konsep yang akan sampaikan maka bisa dikembalikan ke fase sebelumnya untuk belajar lagi. Sehingga dalam satu kelas guru bisa mengajar dengan menggunakan beberapa modul. Modul untuk peserta didik yang belum sampai ke fase sekarang dan modul untuk peserta didik yang sesuai dengan fase sekarang. Jadi ada proses pembelajaran yang terdiferensiasi. Inilah Inti dari kurikulum merdeka pada pengajaran yaitu mengajar pada level yang tepat (the right level) yaitu bagaimana guru mengajar sesuai dengan kemampuan peserta didik.

Penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan disesuaikan lagi dengan masing-masing mata pelajaran karena perbedaan elemen dan tergantung capaian pembelajaran (CP) dari setiap mata pelajaran. Untuk penugasan selain tes, sekarang lebih banyak diarahan ke bentuk yang lain sepert diskusi, presentasi, membuat poster dan lainnya. Nilai juga tidak berfokus pada rentang nilai 0 sampai 100 tetapi dengan menggunakan deskripsi misalnya peserta didik sudah mahir atau masih memerlukan bantuan. Merdeka

belajar memberi kebebasan pada peserta didik dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri karena selama ini pendidikan lebih menekankan pada aspek pengetahuan (Ainia, 2020).

Kendala dan Upaya Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Hasil penelitian mengenai kendala dan upaya implementasi kurikulum merdeka belajar disajikan .pada Tabel 6. Berdasarkan hasil angket, 100% sekolah penggerak atau yang diwakili 15 guru mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam menerapkan kurikulum merdeka di masing-masing sekolah dan sekolah terus berusaha untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Tabel 6. Kendala dan Upaya Penerapan Kurkulum Merdeka Belajar

Kendala dan Upaya	Ya	%	Tidak	%
Sekolah / guru menghadapi kendala dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar	15	100	0	0
Sekolah / guru mencoba atau kegiatan untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar	15	100	0	0

Hasil wawancara mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi kendala sekolah dan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka yang disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Jenis-jenis Kendala dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah

Jenis Kendala	Ya	%
Jumlah jam mengajar guru	13	87
Jumlah peserta didik dalam rombel	13	87
Minat dan bakat peserta didik	6	40
Sistem dapodik	13	87
Rapor peserta didik	12	80
Kompetensi guru	9	60
Sarana dan prasarana	8	53

Hasil penelitian menyiratkan bahwa kendala terbesar sekolah dan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah Jumlah jam mengajar guru, Jumlah peserta didik dalam rombongan belajar (rombel) dan Sistem dalam dapodik yang belum disesuaikan dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Untuk peminatan harus disesuaikan lagi dengan jam mengajar guru agar jam mengajar guru tidak kurang dari 24 jam dan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar harus mencapai 36 agar sesuai sistem dalam dapodik. Sekolah terbentur oleh keadaan dan guru tidak bisa melayani jika peserta didik yang peminatannya kurang dari 36. Jadi ada beberapa hal yang diprogramkan tapi belum sinkron dengan implementasi di sekolah dan berbentur dengan sistem dapodik. Beberapa hal ini yang menjadi kesulitan sekolah dalam mengimplementasikan kurukulum merdeka. Selain itu guru juga menyatakan bahwa terdapat peserta didik yang belum memahami minat dan kebutuhan dirinya atau orientasi setelah lulus. Untuk rapor kendalanya yaitu bahwa dari pusat telah mengeluarkan beberapa pilihan rapor dan sekolah diberi kebebasan untuk memilih. Kekhawatiran guru adalah rapor tiap sekolah tidak sama dan berpengaruh ketika peserta didik akan pindah sekolah ataupun ketika mengikuti tes setelah lulus. Di samping itu kompetensi guru juga perlu ditingkatkan lagi agar implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Guru mengaku masih mengalami kesulitan mulai dari persiapan modul dan RPP, pelaksanaan pembelajaran hingga penilaian yang harus disesuaikan dengan aturan kurikulum merdeka belajar. Kemudian terdapat juga sekolah penggerak yang keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana khususnya ruangan tambahan seperti laboraorium untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Kendala ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkapkan tidak semua usaha yang guru lakukan dalam mengimplementasikan merdeka belajar berhasil, namun guru tetap memberi peluang kepada peserta didik untuk bebas berinteraksi di dalam pembelajaran (Kurniawan, 2020).

Upaya sekolah dan guru dalam mengatasi kendala penerapan implementasi kurikulum merdeka beragam disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Upaya yang dilakukan antara lain: 1) Menyampaikan tentang keluhan-keluhan yang dialami dan sistem di dapodik yang harus diubah dan disesuaikan dengan implementasi di sekolah ketika ada kunjungan dari pusat, 2) untuk minat dan bakat peserta didik guru berusaha memenuhi kebutuhan mereka yaitu dengan pembelajaran terdiferensiasi yang sesuai dengan merdeka belajar. Berbagai metode dipakai dalam kelas dan tiap peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplor kemampuan mereka, 3) Sekolah mengadakan kegiatan IHT (*In House Training)* untuk meningkatkan kompetensi guru dan selalu diprogramkan di setiap awal semester. Selain pemateri dari dalam sekolah yaitu DKP (Dewan Komite Pelajaran) yang mengikuti pertemuan setiap bulan

untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang terbaru kemudian dibagikan kembali ke guru di sekolah masing-masing, ada juga pemateri dari luar sekolah seperti dari dosen-dosen perguruan tinggi yang membawakan materi dan pelatihan misalnya digitalisasi yaitu dalam pembuatan video-video pembelajarandan sebagainya. Selain itu ada kegiatan workshop dan pendampingan-pendampingan oleh guru untuk teman guru dalam suatu mata pelajaran yang serumpun (MGMP). Secara umum, sekolah dan guru terus berusaha, mencari informasi dan saling berbagi untuk mewujudkan program kurikulum merdeka. Harapannya dengan merdeka belajar dapat membentuk pelajar yang berbudi luhur, kompeten, dan siap untuk terjun di masyarakat sesuai dengan bidangnya (Muhajir et al., 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh sekolah penggerak telah menerapkan kurikulum merdeka belajar. Sekolah sudah melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pengganti Ujian Nasional (UN), melaksanakan Ujian Sekolah (Asesmen) pengganti Ujian Sekolah Bertaraf Nasional (USBN), menyusun RPP serta melaksanakan Pembelajaran sesuai pedoman kurikulum merdeka dan menggunakan kebijakan baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kendala yang dihadapi guru dan sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar antara lain sistem dalam dapodik yang belum disesuaikan dengan kurikulum merdeka, jumlah jam mengajar guru, jumlah peserta didik dalam rombongan belajar sehingga minat dan bakat peserta didik yang harus dibatasi dan disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan, rapor peserta didik dengan format yang berbeda tiap sekolah, kompetensi guru yang perlu ditingkatkan lagi dalam memahami dan melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka, dan terdapat sekolah yang masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi merdeka belajar. Upaya beragam dilakukan sekolah untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi mulai dari pelatihan-pelatihan hingga workshop kurikulum baik yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak sekolah sendiri dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sekolah dan guru terus berupaya dan berusaha menjalankan kurikulum merdeka dengan mengikuti segala kebijakan pemerintah didampingi dengan pelatihan sehingga dapat mewujudkan program merdeka belajar. Sekolah mengharapkan program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga akan mendorong sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih menyenangkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki implikasi dan kontribusi bagi pemerintah dan sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi karena temuan ini didanai dan didukung oleh Hibah Penelitian untuk Dosen Pemula dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada Juni 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0267/E5/AK.04/2022 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 1094/LL15/KM/2022, 003/KP-PDP/LPPM-UNISAP/VI/2022.

DAFTAR PUSTAKA

Afista, Y., Priyono, A., & Huda, S. A. A. (2020). Analisis Kesiapan Guru PAI dalam Menyongsong Kebijakan Merdeka Belajar (Studi Kasus Di MTSN 9 Madiun). *Journal of Education and Management Studies*, *3*(6), 53–60.

Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *03*(03), 95–101.

Asfiati, & Mahdi, N. I. (2020). Merdeka Belajar bagi Anak Kebutuhan Khusus di SLB Kumala Indah Padangsidimpuan. *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education*, *3*(1), 59–69.

Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio*, *7*(3), 1075–1090.

Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. In *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* (Vol. 12, Issue 2).

Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *4*(1), 1544–1550.

Hadi, L. (2020). Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *6*(4), 812–818.

Hasim, E. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19. *Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar*, 68–74.

Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. *E-Tech*, *08*(01), 1–29.

Kurniawan, Y. (2020). Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Lembaga Kursus Kelas Anak-Anak. *Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran*

Tamansiswa, 103–109.
Mardiana, D. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi COVID-19: Studi di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia. *Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, *13*(02), 78–91.
Muhajir, Oktaviyanthi, R., Lida, U. M., Nasikhin, Muflihin, A., Syadzili, M. F. R., Nitasari, N., Zukana, S., Hariadi, Babang, V. M. M. F., Romadhon, S., Juwariyah, I., Ande, A., Bangun, S. Y., Maimunah, I., Martiningsih, D., Babang, M. P. I., Widanita, N., E.W.T, A. W., … Masgumelar, N. K. (2021). Implementasi dan Problematika Merdeka Belajar. In *Akademia Pustaka*.
Muji, A. P., Gistituati, N., Bentri, A., & Falma, F. O. (2021). Evaluation of the implementation of the sekolah penggerak curriculum using the context , input , process and product evaluation model in high schools. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, *7*(3), 377–384.
Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep "Merdeka Belajar" Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, *03*(01), 141–147.
Patilima, S. (2021). Sekolah Penggerak Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, *0*(0), 228–236.
Pertiwi, A. K., & Pusparini, R. (2021). Vocational High School English Teachers' Perspectives On "Merdeka Belajar" Curriculum. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(5), 1982–1992.
Ramadania, F., & Aswadi, D. (2020). Blended Learning dalam Merdeka Belajar Teks Eksposisi. *STILISTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, *5*(1), 10–21.
Sasikirana, V., & Herlambang, Y. T. (2020). Urgensi Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Society 5.0. *E-Tech*, *08*(02), 1–8.
Sesfao, M. (2020). Perbandingan Pemikiran Pendidikan Paulo Freire dengan Ajaran Tamansiswa dalam Implementasi Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Nasional "Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa,"* 261–272.
Sherly, Dharma, E., & Sihombing, B. H. (2020). Merdeka Belajar: Kajian Literatur. *Konferensi Nasional Pendidikan I*, 184–187.
Sibagariang, D., Sihotang, H., Murniarti, E., Smk,), & Paramitha, P. (2021). Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, *14*(2), 88–99.
Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Daring Nasional : Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*, 13–28.
Syaifuddin, M. (2020). Implementation of authentic assessment on mathematics teaching: Study on junior high school teachers. *European Journal of Educational Research*, *9*(4), 1491–1502.
Widiyono, A., & Millati, I. (2021). Peran Teknologi Pendidikan dalam Perspektif Merdeka Belajar di Era 4.0. *Journal of Education and Teaching (JET)*, *2*(1), 1–9.
Widodo, T., Samad, D., Kosim, M., Fajri, S., & Fauzani Duski, F. (2020). Merdeka belajar from the perspective of family education. *Social Sciences, Education and Humanities (GCSSSEH)*, *6*, 1–6.
Wijaya, A., Mustofa, M. S., Husain, F., Ramadhani, S., & Khomsa, F. N. (2020). Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros. *Jurnal Puruhita*, *2*(1), 46–50.
Yamin, M., & Syahrir. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, *6*(1), 126–136.